GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Suara Pembaruan**
Subyek : **Lumpur Lapindo**
Tanggal : **14 april 2007**
Hari : **sabtu**
Halaman : **2**

Status Hukum Tim Penanganan Lapindo Harus Diperjelas

PT Lapindo Tetap Bertanggung Jawab

[JAKARTA] Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Emir Moeis, Jumat (13/4), meminta Ketua DPR Agung Laksono berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang mengatasnamakan DPR.

Pimpinan DPR diharap tidak asal mengatasnamakan DPR, untuk menyuarakan kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.

Hal itu disampaikan Moeis menanggapi pernyataan Agung dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat pagi, bahwa DPR menyetujui langkah pemerintah untuk membiayai perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan lumpur Sidoarjo dengan menggunakan dana APBN.

"Ketua DPR tidak dapat mengatasnamakan DPR telah menyetujui dana untuk Lapindo. Prosedurnya, anggaran tersebut harus diajukan oleh pemerintah ke DPR, untuk dibahas dalam pembuatan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2007. Kalau DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan, baru RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR," kata Emir.

Ditegaskannya, Ketua DPR baru bisa mengatakan DPR menyetujui, setelah rapat paripurna DPR menyetujui RUU APBN-P 2007 itu menjadi Undang-Undang. "Ketua DPR harus lebih berhati-hati mengatasnamakan DPR," ujarnya.

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, juga mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur harus ditanggung pemerintah. "Perbaikan infrastruktur tidak bisa dibebankan pada swasta, biaya perbaikan infrastruktur, kan, besar, itu tanggung jawab pemerintah. Kata Agung (Ketua DPR) itu sudah disepakati dengan DPR," ujarnya.

Emir mengatakan, Lapindo tetap harus bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan yang diakibatkannya. "Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat, memang kewajiban. Tapi masak membayar penderitaan rakyat dengan uang rakyat (APBN). Lapindo tetap harus bertanggung jawab mengganti semua kerusakan, dan penderitaan yang disebabkannya," kata Emir.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Meragukan

Anggota Komisi IV DPR, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, kinerja Badan Pelaksana (BP) Lumpur Lapindo, diragukan. Badan ini merupakan pengganti Timnas lumpur Lapindo yang berakhir 8 April lalu. "Saya lihat orang-orang Timnas *power full*, tetapi kurang suskes menangani lumpur," Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Jumat (13/4).

Keraguan Khofifah juga berkaitan dengan adanya hubungan antara pemilik PT Lapindo dengan badan tersebut. Maklum, badan yang terbentuk berlandaskan Keputusan Presiden ini dikepalai Sunarso, Staf Ahli Menko Kesra Bidang Kependudukan dan SDM. Aburizal Bakrie adalah salah satu pemilik PT Lapindo Brantas Inc.

Selain itu, menurut mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, terlalu birokratis. Badan ini tidak memiliki kebebasan untuk mengeksekusi keadaan di lapangan. Hal itu karena mereka harus melapor terlebih dahulu kepada Badan Pengawas seperti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. "Saya kasihan dengan orang-orang yang ada di Sidoarjo. Masyarakat semakin terkatung-katung," ujarnya. [E-5/B-14]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup